



EVALUASI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN)
KAITANNYA DALAM PENCATATAN NILAI
ASET TETAP PEMERINTAH
Studi Kasus pada Pusat Penelitian dan Pengembangan
Tanaman Pangan Bogor

Oleh

* Bambang Pamungkas, *Fatchudin dan Agung Kusumahdinata

* Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor

ABSTRACT

One concrete effort by government to achieve transparency and accountability in managing the state budget (APBN/APBD) is delivery of government financial reporting that meets the principles of timely and prepared to follow governmental accounting standard which have been generally accepted. It is stipulated in law No 17 of 2003 on state finance, which requires the form and content of execution accountability reports APBN/APBD are prepared and presented according to government accounting standard. And explanation of Law No 1 year 2004 regarding state treasury stating that information presented in governmental financial reports can fulfill the principle of timely need to be held in Accounting System Central Government (SAPP), which consists of the central Accounting System (SiAP) and the Agency Accounting System (SAI). SAI consists of Financial Accounting System (GAAP) and the Accounting System State Property Goods (SABMN). Accounting Management Information System, hereinafter abbreviated to SIMAK is a financial application based on the financial accounting system (SAK). Meanwhile, SIMAK Application of State Property Goods (BMN) based on the Accounting System of State Property Goods (SABMN) held with the aim to produce the required information as a tool of accountability for the implementation of APBN and Management/control BMN used by a user of accounting unit goods.

The aim study is to find out how the application procedure SIMAK BMN whether has helped the acceleration of accountability and transparency in the management of government fixed asset, and what are the outputs and the barriers that occur when implementing these procedures. For it is necessary for evaluation application system management accounting of state property goods (SIMAK BMN) related in listing of government fixed asset value starts at the smallest entity that began in the work unit level accounting unit power user stuff (UAKPB). Therefore, the research conducted on unit of work done on research and development center of food crops (Puslitbangtan) Bogor, which is a UAKPB unit under the ministry of agriculture.

Evaluation results show that the application can be helpful for transparency and accountability in the management of government assets if managed properly. it's just that there are some constraints on the arrangement of BMN particularly frequent transfer of chattels which are not reported to the person in charge of the room. Consequently BMN records are inaccurate.

Keyword : Application SIMAK BMN, Recording Government Fixed Asset Value.

PENDAHULUAN

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran tersebut adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar akuntansi pemerintahan kepada suatu komite standar yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh kementerian keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/ lembaga. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dilaksanakan oleh departemen keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Selanjutnya Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) memiliki dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN). Sedangkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian negara/ lembaga yang memproses transaksi keuangan baik arus uang maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Mengingat Pentingnya SAI dalam laporan keuangan pemerintah yang merupakan bagian dari tanggungjawab yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, maka SAK dan SABMN dilakukan menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan aplikasi tersendiri rancangan departemen keuangan RI. Agar mempermudah setiap jenjang unit akuntansi menyampaikan laporan keuangan kepada jenjang di atasnya, sehingga

terjadi percepatan transparansi dan akuntabilitas kepada Publik.

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SIMAK, adalah aplikasi keuangan berdasarkan sistem akuntansi keuangan (SAK). Sedangkan Aplikasi SIMAK-Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan pada Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi pengguna barang.

Pertanggungjawaban kementerian/ lembaga pemerintahan pelaksanaannya dimulai pada entitas terkecil yaitu tingkat satuan kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sampai pada tingkat kementerian. Untuk itu, penulis melakukan penelitian di satuan kerja pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbangtan) Bogor yang merupakan satuan kerja UAKPB dibawah kementerian pertanian.

Masalah yang dihadapi adalah bagaimana proses pelaksanaan Prosedur Aplikasi SIMAK BMN apakah telah dijalankan dengan benar dan dapat membantu percepatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap pemerintah, dan apa saja kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan prosedur tersebut, serta apa dampak penggunaannya terhadap pencatatan nilai aset tetap yang merupakan bagian dari barang milik Negara. Merupakan tanggungjawab unit akuntansi kuasa pengguna barang untuk melaporkan pengelolaan barang milik Negara yang digunakan. Sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance).

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membahas bagaimana sistem aplikasi tersebut bekerja dan apakah output yang dihasilkan telah sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan. Sehingga membantu Unit akuntansi kuasa pengguna barang untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi kepada publik, Sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : (1) Riset Kepustakaan, dan (2) Riset Lapangan dengan cara (a) wawancara dan (b) peninjauan langsung (observasi).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Pengumpulan data yang dikumpulkan adalah (1) Data primer dan (2) Data sekunder.

Metode analisis yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh dan menganalisis adalah metode analisa deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pencatatan nilai aset tetap menggunakan Aplikasi Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara apakah telah membantu percepatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset tetap pemerintah.

Aplikasi SIMAK BMN merupakan aplikasi berbasis komputer/software rancangan dari tim aplikasi sistem akuntansi keuangan dibawah direktorat sistem perbendaharaan departemen keuangan. Aplikasi SIMAK BMN pada puslitbang tanaman pangan diperoleh langsung dari departemen keuangan. Aplikasi tersebut digunakan Untuk pencatatan Barang Milik Negara berdasarkan pada Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Pencatatan Nilai Aset Tetap Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN

Transaksi yang dicatat dalam Aplikasi SIMAK BMN mencakup: Perolehan, Perubahan dan Penghapusan nilai Aset Tetap. Jenis-jenis transaksi menggunakan Aplikasi SIMAK BMN adalah:

1. Saldo Awal
Saldo Awal, terdiri dari saldo BMN pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun mulai diimplementasikannya SIMAK-BMN mencakup seluruh BMN yang telah dimiliki sebelum tahun anggaran berjalan.
2. Perolehan Aset Tetap, Terdiri dari :
 - a. Pembelian

- b. Transfer Masuk
 - c. Hibah
 - d. Rampasan
 - e. Penyelesaian Pembangunan
 - f. Pembatalan Penghapusan
 - g. Reklasifikasi Masuk
 - h. Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak
 - i. Bangun Serah Guna
 - j. Bangun Guna Serah
3. Perubahan Aset tetap, terdiri dari :
 - a. Pengurangan/penyusutan
 - b. Pengembangan
 - c. Perubahan Kondisi
 - d. Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas
 4. Penghapusan Aset tetap, terdiri dari :
 - a. Penghapusan
 - b. Transfer Keluar
 - c. Hibah (keluar)
 - d. Reklasifikasi Keluar
 - e. Koreksi Pencatatan
 5. Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban
Jenis transaksi Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban dilakukan untuk melakukan perekaman atas barang-barang BMN hasil koreksi dari Tim Penertiban Barang Milik Negara (penilaian kembali).
 6. Kartu Identitas Barang (KIB)
Perekaman KIB merupakan fasilitas untuk mendaftarkan keberadaan Aset tetap yang merupakan Barang Milik Negara dan harus dibuatkan KIB. Perekaman BMN dalam KIB bisa dilakukan setelah operator melakukan perekaman perolehan BMN atau menggunakan fasilitas menu Perekaman KIB. Menu KIB juga menyediakan fasilitas perekaman apabila terjadi perubahan informasi atas BMN di dalam KIB.

Jika terjadi perubahan kuantitas atau nilai terhadap suatu BMN tertentu, agar dapat masuk ke dalam Catatan Mutasi Perubahan, maka perubahan yang terjadi haruslah direkam terlebih dahulu melalui menu perekaman KIB tersebut.

Fasilitas perekaman KIB hanya menyediakan perekaman bagi BMN tertentu yang harus dibuatkan KIB nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi BMN berupa tanah, bangunan gedung, alat angkutan bermotor, senjata api, bangunan air dan alat besar.

7. Catatan Mutasi Perubahan (CMP)
Perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap BMN khususnya perubahan kuantitas dan nilai, dicatat dalam *catatan mutasi perubahan*. Sehingga perubahan-perubahan tersebut tetap tercatat dan dapat diketahui bila sewaktu-waktu diperlukan. Catatan Mutasi Perubahan berlaku bagi BMN yang harus dibuatkan KIB nya.
8. Penggolongan dan Kodefikasi Barang
Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok BMN. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing BMN. Penggolongan dan Kodefikasi BMN bertujuan untuk menyeragamkan Penggolongan dan Kodefikasi BMN secara nasional guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN.
9. Penentuan Kondisi BMN
Penentuan kondisi BMN mengacu kepada Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tgl 27 september 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Kriteria kondisi BMN terdiri dari Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB).
kondisi BMN Gedung dan Bangunan :
 - a. Baik (B) apabila utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.
 - b. Rusak Ringan (RR) apabila masih utuh, tetapi memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.
 - c. Rusak Berat (RB) apabila tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.
10. Nomor Urut Pendaftaran (NUP)
Nomor Urut Pendaftaran adalah nomor yang menunjukkan urutan pendaftaran BMN pada Daftar BMN per sub-sub kelompok BMN, disusun berdasarkan urutan perolehan.
11. Satuan Barang
Satuan barang dalam akuntansi BMN menggunakan satuan yang terukur dan baku. Contoh: Tanah dengan M2,

Peralatan dan Mesin dengan Buah, Set, atau Unit, dsb.

Prosedur Penyusunan Laporan SIMAK BMN

Prosedur yang dilakukan sampai pada akhir pelaporan adalah :

1. Petugas SABMN melakukan updating data BMN berdasarkan Berita acara serah terima barang inventaris dan barang-barang yang dapat dikapitalisasi. Dengan kelengkapan saldo awal tahun lalu dan Berita acara serah terima barang. Output yang dihasilkan adalah kompilasi data BMN, bahan laporan barang intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Jangka waktu 30 hari kerja.
2. Draft kompilasi data BMN diperiksa kembali untuk mendapat persetujuan penanggung jawab UAKPB. Jangka waktu 1 hari kerja.
3. Penanggung jawab UAKPB memeriksa dan menyetujui laporan kompilasi data BMN. Output yang dihasilkan merupakan Laporan Bulanan dan atau semesteran.
4. Print out laporan semesteran BMN bersama dengan output hasil software dilakukan rekonsiliasi dengan Direktu Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang (DJKNL). Output yang dihasilkan adalah laporan berita acara rekonsiliasi dari DJKNL. Jangka waktu 3-4 hari kerja
5. Laporan kompilasi data BMN dan berita acara hasil rekonsiliasi dengan DJKNL diverifikasi kembali untuk kembali dimintakan pengesahan dari penanggung jawab UAKPB. Jangka waktu 1 hari kerja.
6. Laporan kompilasi data BMN dan berita acara rekonsiliasi dengan DJKNL setelah ditandatangani dikembalikan ke kasubag keuangan dan perlengkapan.
7. Laporan yang terkoreksi dan berita acara hasil rekonsiliasi dikembalikan kepada operator untuk dikompilasi dengan data SAK.
8. Laporan yang terkoreksi dan berita acara hasil rekonsiliasi digabungkan ke operator SAK secara mekanik melalui sistem dan print out. Output yang dihasilkan adalah softcopy dan hardcopy yang data hasil kompilasi. Jangka waktu 1 hari kerja.

9. Hasil penggabungan data SABMN dan data SAK siap untuk disampaikan ke unit kerja eselon I dan untuk wilayah. Output yang dihasilkan adalah laporan realisasi bulanan dan semesteran.
10. Inventarisasi.
 - Tahapan dalam Melaksanakan Inventarisasi adalah :
 - a. Persiapan
 - 1) Membentuk tim inventarisasi;
 - 2) Membagi tugas dan menyusun dan menyusun jadwal pelaksanaan inventarisasi;
 - 3) Mengumpulkan dokumen BMN;
 - 4) Menyiapkan label sementara;
 - 5) Membuat denah ruangan, memberi nomor ruangan dan menentukan penanggung jawab ruangan;
 - 6) Menyiapkan kertas kerja inventarisasi.
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Menghitung jumlah BMN per sub-sub kelompok barang;
 - 2) Mencatat BMN ke dalam kertas kerja inventarisasi;
 - 3) Menempelkan label pada BMN yang telah dihitung;
 - 4) Menentukan kondisi BMN dengan kriteria baik, rusak ringan, atau rusak berat;
 - 5) Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI);
 - 6) Membandingkan LHI dengan dokumen BMN yang ada;
 - 7) Membuat daftar BMN yang tidak ditemukan, belum pernah dicatat, dan rusak berat serta daftar koreksi nilai;
 - 8) Menyampaikan LHI kepada Pengelola Barang.
 - c. Tindak Lanjut
 - 1) Menelusuri BMN yang tidak ditemukan;
 - 2) Membuat usulan penghapusan BMN yang rusak berat;
 - 3) Menindak lanjuti hasil inventarisasi ke dalam SIMAK-BMN.

Kode Registrasi (Label BMN)

Kode Registrasi adalah kode yang terdiri dari Kode Lokasi ditambah dengan tahun perolehan dan Kode Barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran.

Output dari Aplikasi SIMAK BMN dan kaitannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan acuan Pemerintah untuk menyusun sistem akuntansi pemerintahan, Untuk itu, Laporan yang dihasilkan SABMN haruslah mengacu pada Standar tersebut. Selain laporan Barang kuasa pengguna, SIMAK BMN juga menghasilkan Kartu Identitas Barang dan Daftar Inventaris Barang Sebagai salah satu alat kontrol untuk Barang Milik Negara. Dokumen/laporan yang dihasilkan dari SIMAK-BMN terdiri dari:

1. Daftar BMN;
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah;
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan Gedung;
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor;
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Persenjataan;
6. Daftar Inventaris Lainnya (DIL);
7. Daftar Inventaris Ruang (DIR);
8. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP);
9. Laporan Kondisi Barang (LKB).
10. Laporan Posisi BMN di Neraca
11. Catatan Ringkas BMN.

Daftar BMN meliputi Daftar Barang Intrakomptabel, Daftar Barang Ekstrakomptabel, Daftar Barang Bersejarah, Daftar Barang Persediaan, dan Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). LBKP meliputi LBKP Intrakomptabel, LBKP Ekstrakomptabel, LBKP Gabungan, LBKP Persediaan, LBKP Barang Bersejarah, dan LBKP KDP. LBKP Gabungan merupakan hasil penggabungan LBKP Intrakomptabel dan LBKP Ekstrakomptabel.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Menyebutkan Laporan keuangan Kementerian/ lembaga yang dihasilkan Unit Akuntansi Instansi sekurang-kurangnya terdiri dari; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan atas laporan keuangan. Sebelum diberlakukan Aplikasi SIMAK BMN, Belum ada Neraca BMN pada laporan keuangan. Untuk itu, SIMAK BMN sangat membantu bagi percepatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah apabila dikelola secara benar.

Akan tetapi, Karena berbasis komputer Aplikasi SIMAK BMN sangatlah rentan terhadap Virus yang bisa mengganggu kinerja Operator. Untuk itu komputer yang digunakan hanya dikhususkan untuk Aplikasi SIMAK BMN saja. Selain itu komputer yang digunakan harus dibekali anti Virus yang Up to date, serta memback up pada media penyimpanan lain penting juga dilakukan.

Posisi Aset Tetap Pada Puslitbang Tanaman Pangan dan kendala yang dihadapi pada saat pencatatan nilai Aset tetap menggunakan aplikasi SIMAK BMN.

Posisi Aset Tetap pada Puslitbang Tanaman Pangan Bogor.

Puslitbang tanaman pangan pada tahun 2009 telah melakukan rekonsiliasi data SIMAK BMN hasil pendataan tim KPKNL. Hasil rekonsiliasi data berupa penetapan nilai wajar terhadap seluruh aset, perubahan kondisi, dan koreksi terhadap pencatatan :

1. Tanah

Nilai tanah pada tahun 2009 sebesar Rp. 81.009.202.531.- naik sebesar Rp. 76.770.460.231.- (95%) dari periode tahun 2008 sebesar Rp. 4.238.742.300.- dengan penjelasan sbb :

- a. Saldo 31 Desember 2008 untuk tanah (1.01.01.04.001) seluas 28.535 M2 senilai Rp. 493.350.000.- terdiri dari: 1) tanah kantor induk 13.500 m2 Rp. 209.400.000, 2) ESCAP 6.028 M2 Rp. 170.550.000, 3) Ex PHP 9.007 M2 Rp. 113.400.000. Sedangkan di ketiga tanah tersebut hanya terdapat satu sertifikat (SHP No.4) seluas 25.487 M2 dengan harga wajar senilai Rp. 31.178.367.604.-. Koreksi catat menyebabkan tanah terkoreksi tambah seluas 11,987 M2 × harga perolehan per meter untuk kantor induk Rp. 15.111/m2 = Rp. 185.928.857, ditambah harga wajar Rp. 31.718.367.604. Total koreksi Rp. 185.928.857 + Rp. 31.718.367.604 = Rp. 31.904.296.461. Koreksi pencatatan ESCAP 6.038 M2 + Ex PHP 9.007M2 = 15.035 M2 Senilai Rp. 170.550.000 + Rp. 113.400.000 = Rp. 289.95.000.-. Posisi

laporan (1010104001): SA 08 + Koreksi nilai -Koreksi catat = posisi per 30 juni 2009 : 28.535 M2 Rp. 493.350.000 + 11,987M2 Rp. 31.904.296.461 – 15.035m2 Rp. 283.95.000 = **25.487m2 Rp. 32.113.696.461.-**

- b. Ada penambahan saldo awal untuk tanah bangunan rumah Negara tanpa golongan untuk SHP no. 5 Ds Loji 19.835m2 Rp. 2.810.825.000, SHP no. 2 kedung jaya Rp. 23.225.- dan SHP. No. 3 bantarjati 5.148m2 Rp. 5.148.- total penambahan 48.208m2 senilai Rp. 2.810.853.373.- + koreksi nilai (SHP 2,3,5) senilai Rp. 61.342.751.325.- maka total **48.208m2 Rp. 64.153.604.698**
- c. Terjadi pengembangan nilai aset tanah sebesar Rp. 13.500.000.- akibat dari pembuatan sertifikat tanah Jl. Merdeka 147 Bogor untuk tanah seluas 25.487m2.
- d. Terjadi terasfer keluar tanah seluas 5.14m2 dengan nilai wajar sebesar Rp. 15.271.598.628,- yang terletak di Jl. Kumbang Bogor. Tanah tersebut telah diserahterimakan kepada Badan Litbang Bertanian sesuai BAST No.773/PL.220/J.2/06.09 tanggal 25 juni 2009 antara kepala puslitbang tanaman dengan sekretaris badan litbang pertanian.
- e. Koreksi catat (305/kurang), reklasifikasi keluar (304/kurang) dan transfer keluar (302/kurang), pengembangan nilai (202/tambah) untuk koreksi perubahan nilai tanah.

2. Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin tahun 2009 sebesar Rp. 2.881.524.454.- turun sebesar Rp. 507.018.479.- (18%) dari periode tahun 2008 sebesar Rp. 3.388.542.933.-:

- a. Total mutasi tambah tahun 2009 sebesar Rp. 565.696.992.- terdiri dari (1) pembelian sebesar Rp. 113.240.000.- (2) koreksi nilai tim PA Rp. 438.556.999.- (3) koreksi nilai/kuantitas Rp. 13.899.993.-
- b. Koreksi nilai di kolom pengurangan menunjukkan koreksi harga perolehan thd nilai wajar sebesar Rp. 1.033.417.472 di tambah koreksi pencatatan (305) sebanyak 4 unit terdiri dari 1 unit laptop dan 3 unit CPU, yang hilang akibat kecurian pada tahun 2007 dan telah di ditetapkan dengan

BA.kehilangan dari Kepolisian Sektor Kota Bogor Barat.

- c. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 desember 2009 sebesar Rp. 113.240.000.- terdiri dari Realisasi belanja modal peralatan dan mesin

Pada tahun 2009 puslitbang tanaman pangan juga mengusulkan untuk menghapus BMN khususnya peralatan kantor yang kondisinya rusak berat (RB). Total peralatan yang di usulkan untuk dilakukan penghapusan sebanyak 656 unit. Usulan tersebut telah di setuju kepala puslitbang tanaman pangan melalui surat keputusan No.1410/PL.4101.2/12.09 tanggal 21 Desember 2009 tentang pembentukan panitia penghapusan barang inventaris Puslitbang tanaman pangan.

3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan tahun 2009 sebesar Rp. 10.865.584.500.- naik 77% atau Rp. 8.339.325.100.- dari posisi tahun 2008 sebesar Rp. 2.2525.859.400.- penambahan tersebut disebabkan antara lain koreksi nilai tim penertiban Aset (KPKLN), renovasi gedung garasi puslitbangtan.

- a. koreksi saldo awal 15 unit yaitu :
- 1) 2 unit gedung kantor yangkurang catat yaitu gedung Ek kelti dan arsip ekspedisi
 - 2) 1 unit rumah dignas golongan II di Sindang Barang an.Rosadi
 - 3) 12 unit RD Gol II di Dormitory an: Dr. Made Oka Adnyana, Lukman Gunarto, Wedanambi Tangkono, Agus Iqbal , RDM Simanungkalit, Sunendar K, Dr. Karim Makarim, Ir. Yan Rahman, Dr. Irsal Las.
- b. Koreksi nilai (205) di kolom tambah ialah terjadi penambahan nilai bangunan sebesar Rp. 7.978.424.099 akibat koreksi dari nilai perolehan terhadap nilai wajar. Sedangkan koreksi di kolom pengurang ialah koreksi sebesar Rp. 100.000 terhadap gedung pos jaga dan Rp. 391.800.000.- untuk RD Gol II di dormitory dan Gg. Pasama yang beralih status menjadi RD Gol I (R. Jabatan) dan mess, melalui SK. Mentan No.2490/Kpts/PL.120/6/2009 tanggal 11 juni 2009 dan SK. Mentan

No.2491/Kpts/PL.120/6/2009 tanggal 11 juni 2009.

- c. Terjadi penyelesaian pembangunan (105) untuk bangunan garasi senilai Rp. 247.422.000.- yang berasal dari pekerjaan renivasi

4. Irigasi dan Jaringan

Nilai irigasi dan jarinagn tahun 2009 Rp. 93.500.000.- Naik sebesar Rp. 70.300.000.- (75,18%) dari tahun 2008 sebesar Rp. 23.200.000.- kenaikan tersebut akibat koreksi nilai (205) tim penertiban aset KPKNL terhadap 2 unit bangunan MCK sebesar Rp. 65.400.000 dan 1 unit instalasi PLTD (Genset) sebesar Rp. 4.900.000

5. Aset tetap lainnya

Nilai aset tetap lainnya tahun 2009 sebesar Rp. 283.642.250.- naik sebesar Rp. 19.704.750.- (11%) di bandingkan dengan tahun 2008 senilai Rp. 163.937.500.- kenaikan terjadi akibat belanja modal untuk buku-buku koleksi perpustakaan puslitbangtan dan UN CAPSA sebanyak 28 buku. Total aset tetap lainnya dalam berbagai bentuk buku laporan penelitian dan buku-buku perpustakaan yang berada di perpustakaan puslitbangtan dan UN CAPSA library sampai dengan tahun 2009 berjumlah 7.338 buku.

Kendala dalam pengungkapan barang milik Negara

Sebagai unit kerja eselon-II yang membawahi 1 Balai Besar, 2 Balit dan 1 loka, dalam pengungkapan BMN yang merupakan kewenangan balit/BB puslitbangtan hanya melakukan pembinaan terhadap tata tertib administrasi dan pengelolaan BMN sesuai SAP. Pada akhir laporan BMN semester I, terdapat beberapa balai di bawah puslitbangtan telah berhasil diperbaiki kualitas laporan BMN diantaranya Balitsereal dan BB padi. Balit/loka lainnya belum dilakukan koreksi atas laporan BMN-nya. Hal tersebut diakibatkan puslitbangtan tidak mendapatkan gambaran konkrit terhadap kesulitan yang dihadapi balit/loka tersebut.

Penataan BMN khususnya barang bergerak (peralatan kantor, dll) kerap terjadi perpindahan yang tidak dilaporkan kepada

pertanggung jawab ruangan, akibatnya catatan BMN tidak akurat, sehingga menyulitkan pada saat terjadi offname fisik yang dilakukan tim inventaris puslitbangtan maupun pada saat pemeriksaan oleh itjen atau BPK.

Dalam penentuan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Tanaman Pangan belum ada kesepahaman antara Puslitbang Tanaman Pangan dengan Menteri keuangan tentang bagaimana cara menghitung hasil dari penelitian yang dilakukan. Hal ini dikarenakan penelitian tersebut mengeluarkan banyak biaya, tetapi tidak dapat di hitung pemanfaatan hasilnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Prosedur Pencatatan Aset Tetap Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN pada Puslitbang Tanaman Pangan Bogor, telah Membantu Percepatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Menyebutkan Laporan keuangan Kementrian/ lembaga yang dihasilkan Unit Akuntansi Instansi sekurang-kurangnya terdiri dari; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan atas laporan keuangan. Aplikasi sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik Negara telah menghasilkan Laporan barang milik Negara Puslitbang Tanaman Pangan tahun 2009 yang telah disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tatakelola yang baik (good governance). Karena sebelum diberlakukan Aplikasi SIMAK BMN, Belum ada Neraca BMN pada laporan keuangan.

Selain itu dengan menggunakan aplikasi SIMAK BMN dapat mempermudah melaporkan laporan penggunaan barang kepada jenjang unit di atasnya karena dilengkapi akses web. Untuk itu, SIMAK BMN sangat membantu bagi percepatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah apabila dikelola secara benar.

Hanya saja terdapat beberapa kendala yaitu terhadap pengawasan benda bergerak dan masalah yang dihadapi SABMN pada saat melakukan rekonsiliasi internal kepada SAK adalah data yang dihasilkan mengalami tidak sinkron atau ketidakcocokan antara SAK dan SABMN. Hal ini diakibatkan Up date-an yang diperoleh untuk Aplikasi SAK dan SABMN tidak sama, Up date-an Aplikasi SAK telah keluar lebih awal sedangkan Up date-an Simak bmn belum keluar/termodifikasi.

2. Output dari Aplikasi SIMAK BMN dan Kaitannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dokumen/laporan yang dihasilkan dari SIMAK-BMN terdiri dari:

- 1) Daftar BMN;
- 2) Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah;
- 3) Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan Gedung;
- 4) Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor;
- 5) Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Persenjataan;
- 6) Daftar Inventaris Lainnya (DIL);
- 7) Daftar Inventaris Ruang (DIR);
- 8) Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP);
- 9) Laporan Kondisi Barang (LKB).
- 10) Laporan Posisi BMN di Neraca
- 11) Catatan Ringkas BMN.

Pelaporan barang milik Negara tingkat satuan kerja pusat penelitian dan pengembangan tanaman pangan telah disusun sesuai dengan peraturan pemerintahan nomer 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) dan tujuan catatan atas laporan barang milik Negara adalah menyajikan informasi atas penjelasan atas laporan barang dalam rangka pengungkapan yang memadai

Dengan adanya Aplikasi Simak bmn pencatatan aset tetap lebih terpolo/sistematis, dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Dan menggunakan aplikasi ini mudah menurut operator yang telah memahami alur manajemen aset dan program. Akan tetapi, Karena berbasis komputer Aplikasi SIMAK BMN sangatlah rentan terhadap Virus yang bisa mengganggu kinerja Operator. Virus dapat merusak bahkan menghilangkan data, sehingga perwujudan

transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran akan terhambat.

3. Posisi Aset Tetap Pada Puslitbang Tanaman Pangan Bogor dan Kendala yang dihadapi pada saat Pencatatan Nilai Aset tetap Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN.

Status barang milik Negara pada puslitbang tanaman pangan : Laporan barang milik Negara puslitbang tanaman pangan untuk tahun 2009 sebesar Rp. 109.911.185.613,- terdiri dari 1. Saldo per 31 desember 2008 sebesar Rp. 10.340.282.133,- 2. Mutasi tambah Rp. 105.458.728.002,- 3. Mutasi kurang Rp. 20.765.556.400,-.

Realisasi pengadaan barang dan jasa : Sampai dengan 31 desember 2009 sebesar Rp. 393.866.750,- terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin Rp. 113.240.000,- belanja modal lainnya (Aset tetap lainnya) Rp. 19.704.750,- renovasi gedung Rp. 247.422.000 pengembangan aset tanah (pembuatan sertifikat tanah jl. merdeka 147 bogor) Rp. 13.500.000,- Jumlah aset tetap per 31 desember 2009 adalah sebesar Rp. 95.033.453.735,- terdiri dari tanah sebesar Rp. 81.009.202.531,- peralatan dan mesin sebesar Rp. 2.881.524.454,- gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.865.584.500,- jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 93.500.000,- aset tetap lainnya sebesar Rp. 183.642.250,-

Kendala dalam pengungkapan barang milik Negara : Sebagai unit kerja eselon-II yang membawahi 1 Balai Besar, 2 Balit dan 1 loka, dalam pengungkapan BMN yang merupakan kewenangan balit/BB puslitbangtan hanya melakukan pembinaan terhadap tata tertib administrasi dan pengelolaan BMN sesuai SAP. Pada akhir laporan BMN semester I, terdapat beberapa balai di bawah puslitbangtan telah berhasil diperbaiki kualitas laporan BMN diantaranya Balitsereal dan BB padi. Balit/loka lainnya belum dilakukan koreksi atas laporan BMN-nya. Hal tersebut diakibatkan puslitbangtan tidak mendapatkan gambaran konkrit terhadap kesulitan yang dihadapi balit/loka tersebut.

Penataan BMN khususnya barang bergerak (peralatan kantor,dll) kerap terjadi perpindahan yang tidak dilaporkan kepada

pertanggung jawab ruangan, akibatnya catatan BMN tidak akurat, sehingga menyulitkan pada saat terjadi opname fisik yang dilakukan tim inventaris puslitbangtan maupun pada saat pemeriksaan oleh itjen atau BPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002 *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bahtiar Arif. dkk. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Direktorat Sistem Pembendaharaan RI. 2008. *Petunjuk Operasional Aplikasi Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara*. Departemen Keuangan. Jakarta.
- Edi Sutanta. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- George H.bodnar dan William s.hopwood 2003. *Sistem Informasi Akuntansi* Edisi ke delapan. Indeks. Jakarta.
- Raymon McLeod, Jr. Dam George P.scheel .2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Edisi ke sepuluh. Salemba empat. Jakarta.
- Gede Muhammad. 2002 *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ihyaul Ulum MD. 2004 *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Umm Press. Malang.
- Iriyadi, Hastoni. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan (STIEK). Bogor.
- Joseph W. Wilkinson, Michael J. Cerullo, Vasant Raval and Bernard Wong on wing. 2000. *Accounting Information System*, EssesntialL concepts and aplication. 4th edition. John wiley and sons, Inc.
- Mulyadi. 2001. *Sistem akuntansi*. Edisi 3, Salemba 4 Jakarta.
- Narko, 2002. *Ssatem Akuntansi*. Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta .
- Mursyidi. 2004 . *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah . 2005 *Peraturan Pemerintah No. 24 tentang*

- Standar Akuntansi Pemerintah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 06. 2006. *Pengelolaan Barang Milik Negara*. Departemen Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 29. PMK.06. 2010 *Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara*. Departemen Keuangan. Jakarta.
- Peraturan menteri keuangan No:171/PMK. 05/2007 *Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat*. Departemen keuangan. Jakarta.
- Peraturan menetri keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 *Tata cara rekonsiliasi barang milik Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat*. Departemen keuangan. Jakarta
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan 2009 *Laporan keuangan realisasi anggaran 2009*. Departemen Pertanian. Bogor.
- Website. pangan.litbang.deptan.go.id d/h www.puslittan.bogor.net diakses tanggal 30 Mei 2010.
- Website Wikipedia.org *Definisi Evaluasi*. Diakses tanggal 5 Juni 2010.
- Website Http://ekolumajang.wordpress.com. *lampiran PMK Nomer 29/PMK.06/2010 tentang penggolongan dan kodefikasi barang*. Di akses 5 juni 2010.